

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada 17 Agustus 1945 Soekarno mengumandangkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara terbuka, kesempatan tersebut bangsa Indonesia dapat mengatur kehidupan bernegara sesuai keinginannya. Dalam arti Indonesia sudah lepas dari belenggu penjajah Belanda.

Situasi ini seperti telah membuka kesempatan bagi anak bangsa untuk mendirikan partai-partai politik dengan landasan perjuangan masing-masing. Saat itu, Umat Islam punya andil yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini dengan menyambut semangat membara. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh umat Islam dengan diselenggarakannya Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada 7-8 November 1945.<sup>1</sup> Salah satu hasil kongres tersebut ialah dibentuknya Masyumi sebagai partai politik

Awal terbentuknya Masyumi sebagai partai politik Islam dianggap masa kongkrit, dalam arti sebagai kebangkitan dan kemajuan kembali Islam dalam kontestasi perpolitikan bangsa yang baru lahir ini. Umat Islam merindukan persatuan seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda, dengan adanya SI (Syarikat Islam) yang dimana mengalami degradasi atau penurunan eksistensi dikarenakan konflik internal dikalangan SI-nya sendiri pada 1930-an.

Jika berbicara partai politik Islam di Indonesia, sepertinya dalam ingatan Bangsa Indonesia, Partai Masyumi masih mempunyai tempat

---

<sup>1</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisa Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Bandung. Penerbit Grafiti 1987) hal. 51

yang istimewa dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tentu saja, partai Masyumi bisa demikian dikarenakan telah menjalankan kerja-kerja partai atau mencetuskan ide-ide besar lewat kader-kadernya. Apalagi partai Masyumi memiliki ikatan berbasis agama dan mendapatkan simpati dari kalangan petani seperti yang dilakukan Masyumi di Kediri, yang mempunyai program menyediakan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan, mengelola koperasi petani, memberikan kredit usaha dengan bunga rendah kepada pedagang miskin.<sup>2</sup> Sehingga meninggalkan ingatan dirakyat Indonesia dan tercatat oleh tinta-tinta sejarawan.

Sedangkan kelahiran Partai Masyumi sendiri terjadi pada 7-8 November 1945, sebuah masa di mana kepastian keamanan masih belum jelas. Hal ini dikarenakan kedatangan pasukan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II yang bertugas melucuti sisa-sisa pasukan Jepang, dengan membebaskan orang-orang Eropa yang sempat ditahan pemerintahan pendudukan Jepang serta gesekan-gesekan bersenjata yang berujung dengan pertempuran antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu diberbagai daerah.

Akan tetapi, situasi keamanan yang masih dilanda ketidakpastian tersebut tidak menghalangi semangat untuk diadakannya suatu kongres umat Islam di Yogyakarta yang berhasil menghimpun sekitar 500 utusan dari perkumpulan atau organisasi Islam.<sup>3</sup> Situasi keamanan Indonesia yang belum pasti tersebut sudah pasti menjadi perhatian utama bagi Masyumi yang baru lahir ini, salah satu usaha Masyumi dalam menciptakan keamanan dimasa-masa perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan menyerukan resolusi dalam kongresnya:

---

<sup>2</sup> Geogre McTurnan Kahin. 2013. *Nasionalisme dan revolusi Indonesia*.(terj) Tim Komunitas Bambu. Depok. Komunitas Bambu. Hlm. 662

<sup>3</sup> *Op. Cit.* Remy Madinier. Hlm 66

1. Memperkoet persipan oemat Islam oentoek berdjihad
2. Memperkoet barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai-bagai oesaha yang diwadjibkan oleh agama Islam.<sup>4</sup>

Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya, menganggap berdirinya Masyumi sebagai jawaban positif umat terhadap manifesto politik wakil presiden Hatta pada 1 November 1945 yang mendorong pembentukan-pembentukan partai.<sup>5</sup>

Setelah pelaksanaan pemilihan umum 1955, Partai Masyumi memperoleh suara terbesar kedua, hasil ini menguntungkan posisi Masyumi terutama di Parlemen. Pada masa ini pula, dibahas kembali masalah dasar negara sesuai kesepakatan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang pada waktu dasar negara Republik Indonesia masih bersifat sementara dan akan dibahas kembali jika kondisi keamanan Indonesia mulai aman. Sebagai partai berbasis Islam, tentu saja Masyumi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut terutama lewat wakil-wakilnya di Majelis Konstituante yang dibentuk untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sebelumnya. Secara genealogis, ide tentang cita-cita Islam sebagai Dasar Negara merupakan kelanjutan dari masa perjuangan pada era pendudukan Jepang, yang pada waktu itu Jepang lebih melonggarkan gerakan Islam sebagai alat untuk mengikis pengaruh Barat di Indonesia apalagi mitos-mitos tentang munculnya Ratu Adil dan Imam Mahdi masih beredar di masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Op. Cit* Remy Madinier. Hlm 68

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan cet-2* (Jakarta. LP3ES 1985) Hal 111.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo. *Paradigm Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. (Bandung Penerbit Mizan 1991). Hlm. 90.

Perdebatan ideologi yang melibatkan kader-kader Masyumi semakin menguat setelah diadakannya kongres Masyumi ke-VIII di Bandung, salah satu tuntutan atau rekomendasi hasil kongres tersebut ialah:

*”Agar Islam ditetapkan sebagai dasar mutlak dari negara Republik Indoensia”: : agar agama Islam ditetapkan sebagai sumber utama bagi hukum-hukum dalam negara Republik Indonesia”.*<sup>7</sup>

Dari bunyi rekomendasi hasil kongres diatas, dengan jelas masyumi ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan ruh atau nafas sumber segala hukum di Indonesia. Di Majelis Konstituante, perdebatan makin sengit ketika para wakil dari Masyumi menganggap kesepakatan-kesepakatan perumusan UUD 1945 tidak berlaku lagi menjadi kerangka acuan dalam pembahasan dasar negara dan mereka juga menolak segala kompromi. Keinginan ini para wakil Masyumi ini tentu saja mendapat penolakan dari fraksi-fraksi partai lain terutama dari kalangan Nasionalis.<sup>8</sup>

Pada Februari 1958 terjadi pemberontakan PRRI dan yang mana Mohammad Natsir, selaku pimpinan Partai Masyumi sedang berada di wilayah yang bergejolak tersebut, pemerintahan Soekarno menuduh Mohammad Natsir ikut terlibat dalam gerak tersebut. Tidak lama setelah itu kursi Ketua Umum berpindah tangan kepada Prawoto Mangkusasmito lewat Mukhtar yang diselenggarakan di kota Yogyakarta.<sup>9</sup> Tentu saja, bagi Prawoto Mangkusasmito bukan tugas yang tidak mudah ketika harus memimpin Partai yang sedang dituduh terlibat suatu pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Selain Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoedin Harahap adalah elit-

---

<sup>7</sup> *Op. Cit* .Remi Madinier. Hlm. 309.

<sup>8</sup> *Ibid*. Remy Madinier. Hlm. 303.

<sup>9</sup> *Op. Cit* Deliar Noer. Hlm. 405.



elit Partai Masyumi yang berada di Sumatra Barat sewaktu pemberontakan PRRI meletus, tentu saja ini merupakan pekerjaan besar Prawoto Mangkusasmito yang harus diselesaikan. Untuk itu, Prawoto menunjuk M. Roem sebagai pengacara untuk mewakili Masyumi di pengadilan untuk menghadapi tuduhan bahwa partai Masyumi terlibat pemberontakan di Sumatra Barat.<sup>10</sup>

Meletusnya pemberontakan PRRI pada 1958 yang dapat ditumpas oleh Militer Indonesia serta keberadaan para pemimpin Masyumi di Sumatra Barat, membuat Partai harus bekerja keras terutama tuduhan keterlibatan Masyumi secara organisatoris. Tahun tersebut, merupakan tahun-tahun yang berat bagi Masyumi baik yang dialami partai maupun anggota-anggotanya, seperti yang terjadi pada Kasman Singodimedjo yang ditangkap karena pidatonya dianggap berisikan dukungan terhadap pemberontakan, atau lima pimpinan cabang di Jawa Barat yang di penjara dikarenakan menerbitkan salah satu keputusan Partai dan beberapa cabang di Sumatra dan Sulawesi mengalami pelarangan kegiatan partai oleh militer dan alasan yang tidak jelas.<sup>11</sup>

Tidak lama setelah munculnya tuduhan keterlibatan para pemimpin Partai Masyumi dalam gerakan pemberontakan, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (PENPRES) Republik Indonesia No 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian. Dengan adanya aturan ini Soekarno menuduh Masyumi;

*“sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta melakukan dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalakan perbuatan anggota-anggotanya itu”<sup>12</sup>.*

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Deliar Noer. Hlm. 415

<sup>11</sup> *Op. Cit.* Remy Madinier. Hlm. 253.

<sup>12</sup> Pasal 9 (1) POIN 3 PENPRES NO 7 TAHUN 1959.

Untuk menanggapi tuduhan Soekarno tersebut, tentu saja para pemimpin Masyumi seperti Prawoto Mangkusasmito yang merupakan Ketua Umum Partai Masyumi hasil Muktamar IX<sup>13</sup>. Pada waktu itu melakukan segala daya upaya dan mengajukan pembelaan atas tuduhan pemberontakan yang berakibat putusan dibubarkannya Masyumi. Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno tersebut mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan terutama dari Partai Masyumi. Masyumi dibawah kepemimpinan Prawoto Mangkusasmito turut mengomentari bahwa Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada 31 Desember 1959 merupakan produk hukum yang harus dibuat secara hati-hati, terutama pasal-pasal yang sebenarnya wilayah wewenang kekuasaan legislatif.

Cobaan yang harus dihadapi oleh Masyumi bukan hanya pada pasal-pasal yang tertera dalam Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 saja. Presiden Soekarno pada 5 Juli 1960 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, peraturan ini berisikan tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai. Sebuah peraturan yang berisikan wilayah kekuasaan presiden semakin kuat. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, apa yang harus dihadapi Partai Masyumi semakin berat, karena peraturan ini sudah membahas mekanisme pembubaran sebuah partai beserta dasar-dasar hukumnya. Selain menyangkal tuduhan lewat proses peradilan, para pemimpin Partai Masyumi juga melakukan kerja-kerja Partai seperti pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah menyangkut persoalan dan solusi yang sedang dihadapi Partai Masyumi.

---

<sup>13</sup> *Op. Cit.* Remy Madinier.Hlm. 255.

Akan tetapi, menurut Deliar Noer usaha para pemimpin Masyumi di pengadilan mengalami suatu dilema, apakah harus membubarkan diri atau dibubarkan sehingga menjadi partai terlarang.<sup>14</sup> Kedua pilihan sulit mempunyai resikonya tersendiri, jika memilih dibubarkan pemerintah lewat penetapan presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno sama saja menjadi partai terlarang dan semua aset baik harta benda maupun dokumen yang dimiliki partai tidak akan luput dari penyegelan dan penyelidikan sedangkan jika Masyumi memilih membubarkan diri, sama saja mengakui tuduhan akan keterlibatan partai dalam pemberontakan di Sumatra Barat.

Setelah melakukan berbagai lobi-lobi politik dengan pemerintah, pada 17 Agustus 1960 Partai Masyumi harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Perintah pembubaran Partai Masyumi dikeluarkan Lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960. Lewat keputusan tersebut, pemerintahan Soekarno memberikan waktu selama 30 hari kepada Partai Masyumi untuk memberikan jawaban. Pada akhirnya, Partai Masyumi harus memilih apa yang menjadi dilema selama ini, pada 13 September 1960 lewat keputusan bertanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Partai Masyumi menyatakan bubar termasuk seluruh bagian-bagiannya<sup>15</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud membahas biografi Prawoto Mangkusasmito dan peranannya sebagai ketua umum partai Masyumi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan partai Masyumi terutama terkait dengan tuduhan keterlibatan pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. Dengan demikian,

---

<sup>14</sup> *Op. Cit* Deliar Noer. Hlm. 416.

<sup>15</sup> S.U. Bajasut. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Hal 198

judul yang coba penulis angkat adalah “Prawoto Mangkusasmito Dan Bubabrnya Partai Masyumi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah biografi Prawoto Mangkusasmito dan peranannya sebagai ketua umum partai Masyumi dan bubarnya partai Masyumi atas tuduhan para pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan di Sumatra Barat. Secara sederhana pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sejarah Partai Masyumi?
- b. Bagaimana Biografi Prawoto Mangkusasmito?
- c. Bagaimana Proses Bubarnya Partai Masyumi?

## **C. Tujuan Masalah**

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Mengetahui Sejarah Partai Masyumi.
- b. Mengetahui Biografi Prawoto Mangkusasmito Sebagai Ketua Umum Partai Masyumi.
- c. Mengetahui Proses Bubarnya Partai Masyumi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang mengkaji biografi Prawoto Mangkusasmito dan bubarnya Partai Masyumi pada 1960, terdapat buku-buku yang membahas tentang hal tersebut beserta sumber-sumber lainnya yang masih dan digunakan antara lain:

1. S.U. Bajasut dan Lukman Hakiem (editor), 2014. PT. Kompas Media Nusantara Jakarta. *Alam pikiran dan jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito Ketua Umum (terakhir) Partai Masyumi*, di mana buku ini untuk mengenang perjuangan partai Masyumi di masa



sebelum bubarnya partai ini di bawah komando Prawoto Mangkusasmito sebagai ketua terakhir partai Masyumi, dan penulis menggunakan buku ini pada edisi ke II yang diterbitkan oleh PT. Kompas. Adapun persamaan pembahasan skripsi ini ialah sama-sama membahas biografi tentang Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua Umum Partai Masyumi sampai bubarnya Partai tersebut. sedangkan untuk perbedaannya dengan skripsi ini ialah tidak membahas sama dengan buku ini, karena penulis lebih menitikberatkan pada biografi dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua Umum ketika menghadapi dinamika partai yang terancam dibubarkan oleh pemerintah.

2. Tesis Ahmad Syafii Maarif, 1985. Chicago University. Terjemahan LP3ES Bahasa Indonesia. *Islam dan masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitunte*. Dalam tesis ini membahas tentang masalah kenegaraan pada masa demokrasi terpimpin, maka penulis ingin mengkorelasikan tentang konstelasi pesta demokrasi dan dinamikanya yang terjadi pada masa partai Masyumi. Adapun persamaan dengan penelitian ialah kesamaan akan peran atau hadirnya Partai berbasis Islam yang terjun ke panggung politik nasional, sedangkan perbedaannya ialah jika pada penelitian Ahmad Syafii Maarif membahas hubungan Islam dan masalah kenegaraan maka pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada dinamika Partai Masyumi selaku Partai berbasis Islam dan masalah yang dihadapinya yang berujung bubarnya Partai Masyumi.
3. Remy Madinier. 2013. Penerbit Mizan Jakarta. *Partai Masjumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Buku ini merupakan hasil karya dari sarjana Prancis yang diterjemahkan oleh Forum Jakarta-Paris dan diterbitkan lewat kerja sama antara penerbit Mizan

dan forum Jakarta-Paris atas dukungan departemen luar negeri Prancis. Pada buku ini, Remy Madinier menjelaskan hubungan Partai Masyumi antara ideologi partai dan situasi politik yang sangat berdinamika sedangkan penelitian ini lebih kearah dampak yang diterima oleh Partai Masyumi atas arah gerak Partai yang berujung bubarnya Partai Masyumi.

4. Deliar Noer. 1987. Penerbit Grafiti Bandung. *Partai Islam Di Pentas Nasional; Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Buku ini merupakan hasil penelitian dari Deliar Noer, seorang peneliti sejarah politik Indonesia terbaik yang karya-karyanya selalu dijadikan rujukan bagi peminat sejarah politik Indonesia terutama karena hubungan kedekatannya dengan elit-elit partai-partai politik di Indonesia pada saat itu. Adapun persamaan penelitian penulis ialah sama-sama membahas kiprah-kiprah Partai-Partai Islam dalam alam demokrasi Indonesia sedangkan perbedaan dengan penelitian ialah penelitian ini lebih berfokus pada Partai Masyumi menjelang bubarnya dan kiprah Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua Umum Partai Masyumi terakhir.
5. Herbert Feith & Lance Castle (editor). 1988. LP3ES Jakarta. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan dari tulisan, naskah-naskah ceramah, dokumen-dokumen partai yang ditulis atau disampaikan oleh tokoh-tokoh partai dan akademisi Indonesia tentang situasi perpolitikan Indonesia yang dihimpun dan disusun oleh Herbet Feith dan Lance Castle seorang peneliti asal Amerika Serikat. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggambarkan situasi politik Indonesia, sedangkan untuk perbedaannya ialah penelitian ini lebih

menitikberatkan pada Masyumi menurut pandangan para tokoh-tokoh nasional.

## E. Landasan Teori

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sudah terdapat pembagian wewenang dalam menjalankan kebijakan. Demokrasi dengan *trias politika*-nya telah memunculkan konsep bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur politik melainkan harus terpisah dilembaga-lembaga yang berbeda. Atas dasar ini lahirlah negara baru dengan semangat demokrasi yang dianggap sebagai solusi terbaik dalam kehidupan bernegara.<sup>16</sup> Salah satu unsur dalam negara demokrasi ialah kehadiran partai-partai politik, partai politik menurut Miriam Budiardjo:

*"partai politik merupakan sarana warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara."*<sup>17</sup>

Oleh karena itu, dari sudut pandang politik penulis berupaya memakai teori tentang kesetaraan dalam demokrasi yang dicetuskan oleh Alexis de Tocqueville seorang sosiolog sekaligus ilmuwan politik asal Perancis. Selain teori dari Alexis de Tocqueville, penulis juga memakai teori hegemoninya Antonio Gramsci, hal ini berkaitan dengan perseteruan atau gesekan antara daerah dan pusat yang kemudian menjadi gerakan pemberontakan sebagaimana yang dijelaskan di bagian latar belakang masalah.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, kehadiran partai politik sudah diatur sejak awal negara Indonesia berdiri yakni ketika Wakil

---

<sup>16</sup> Rudiaji Mulya. *Feodalisme Dan Imprealisme Di Era Global*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo). Hlm 257.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 397.

Presiden Mohammad Hatta menandatangani sebuah dokumen yang lebih dikenal dengan Maklumat No. X yang dikeluarkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebuah lembaga yang mempunyai wewenang legislatif yang dijalankan oleh badan pekerja sebelum MPR dan DPR terbentuk.<sup>18</sup>

Maka dari itu, pada sisi sosiologis, penulis mencoba menggunakan teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan disaat usia republik yang tergolong masih muda pada saat itu.

Penulis menyadari, penelitian ini termasuk kajian sejarah biografi dan politik. Untuk itu digunakan beberapa pendekatan sebagai bahan pendukung dan penguat kerangka teori, diantaranya adalah:

1. Pendekatan Sejarah Intelektual

Pendekatan sejarah intelektual atau pemikiran merupakan sebuah pendekatan yang membahas berbagai pemikiran-pemikiran individu atau kelompok. Pendekatan ini menghiasi suatu masa atau zaman dan bisa menjadi khazanah keilmuan bagi peminatnya.

2. Pendekatan Sejarah Konstitusional

Menurut Kuntowijoyo lewat pendekatan sejarah konstiusional kita bisa mengetahui filsafat hidup, dasar pemikiran waktu membangun negara dan struktur pemerintahan yang dibangun.<sup>19</sup> Pendekatan konstitusional diharuskan ada dalam penelitian ini karena akan disinggung beberapa aturan baik aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan-aturan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi non-pemerintah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Miriam Budiardjo. Hlm. 425-426.

<sup>19</sup> Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya. Hlm. 177.



### 3. Pendekatan Sejarah Institusional

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian sejarah politik maka sudah pasti yang dibahas adalah beberapa lembaga baik lembaga Negara maupun lembaga non-negara seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

### 4. Pendekatan Sejarah Sosial

Pendekatan sejarah sosial tidak akan lepas dari dari penelitian sejarah politik, hal ini dikarenakan objek-objek penelitiannya adalah kelompok-kelompok masyarakat seperti petani, buruh, pengusaha, pemuda, mahasiswa juga mempunyai aspirasi politik.

### 5. Pendekatan Studi Kasus

Pembahasan pada latar belakang masalah diatas seperti kehadiran partai-partai politik, meletusnya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah merupakan alasan pendekatan ini dimasukan dalam landasan teori penelitian ini.<sup>20</sup>

### 6. Pendekatan Biografis

Selain kajian sejarah politik, penelitian ini juga memasukan sebagian kajian biografis. Kajian biografis disini berusaha menjelaskan peranan Prawoto Mangkusasmito sebagai ketua umum partai Masyumi yang terpilih dimasa genting dan usaha-usaha beliau dalam menjawab tuduhan-tuduhan yang disangkakan baik kepada partai maupun kepada anggota-anggotanya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku atau sejenisnya sebagai sumber data. Metode yang digunakan dalam penelitian sudah menjadi

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Kuntowijoyo. Hlm. 178-181.

keharusan bagi para sejarawan dalam menggunakan metode sejarah untuk melihat kejadian-kejadian di masa lampau dan menganalisa secara kritis terhadap data yang diperoleh sehingga pada akhirnya menghasilkan sintesa.

Metode sejarah memusatkan perhatian data di masa lalu berupa pengalaman, dokumen, arsip, benda-benda bersejarah, dan tempat-tempat yang dianggap keramat (sakral), hal demikian dilakukan untuk memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu seperti adat istiadat, kebudayaan, hukum yang berlaku, struktur masyarakat dan pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi, agama, maupun yang lainnya. Metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi atau analisis data, dan historiografi atau penulisan.

#### 1. Heuristik

Langkah awal pengumpulan data. Salah satu cara agar memudahkan dalam pengumpulan data yaitu dengan membaca bibliografi terdahulu mengenai topik penelitian. Selain peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjangkau sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukannya.<sup>21</sup>

Penulis mencari sumber-sumber ke beberapa perpustakaan, di antaranya perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, perpustakaan pasca sarjana, perpustakaan 400 dan perpustakaan Sumber. Selain ke beberapa perpustakaan yang ada di sekitar Cirebon, penulis juga mencari sumber di internet.

---

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta Selatan : Logos Wacana Ilmu, 1999). Hlm 105.

## 2. Verifikasi

Setelah data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya dengan verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (*otentitas*) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (*kredibilitas*) yang ditelusuri melalui kritik intern. Dalam hal ini penulis harus melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, yaitu dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Nugroho Notosusanto menegaskan bahwa:

*“Setiap sumber mempunyai aspek intern dan ekstern. Aspek ekstern bersangkutan dengan apakah sumber itu memang sumber, artinya menjadi sumber yang dibutuhkan? Kritik ekstern atau luar dilakukan untuk meneliti keaslian sumber tersebut valid, asli atau tiruan? Sumber tersebut utuh atau dalam artian belum berubah, baik bentuk maupun isinya. Aspek intern berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan atau tidak. Kritik intern atau kritik dalam dilakukan untuk menyelidiki sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian. Tahapan ini menjadi ukuran objektivitas penulis dalam mengolaborasi data atau sumber yang telah diperolehnya, dan tentu mengedepankan prioritas”.*<sup>22</sup>

## 3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan yang berkaitan dengan apa yang masih dijadikan pedoman, dan apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan.<sup>23</sup> Di samping itu interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta

---

<sup>22</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014). Hlm. 101-102.

<sup>23</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, cetakan ke II, (Jakarta : Amzah, 2010). Hlm. 4.

menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada konteks masa lalu dalam sejarah yang aktual karena yang ada hanyalah interpretasi historis.<sup>24</sup>

Interpretasi sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh. Tahapan ini merupakan sebuah hasil dari kegiatan kritik sumber sebelumnya, sehingga diperoleh sebuah penafsiran dengan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian menjadi susunan secara kronologis dan logis.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah akhir dari serangkaian proses penelitian yang dilakukan, sebagai bentuk usaha mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjurus pada tindakan manusia di masa lampau. Setelah data sudah dikumpulkan, dikritik dan di analisa maka langkah selanjutnya yaitu penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang sudah dilakukan.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi untuk mempermudah pemahaman. Dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan.

Bab *pertama* Pendahuluan. Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* membahas tentang sejarah lahirnya Partai Masyumi.

Bab *ketiga* membahas tentang biografi Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua Umum Partai Masyumi.

---

<sup>24</sup> Sulasman, *Op. Cit.* Hlm. 107.

<sup>25</sup> *Op. Cit.* Dudung. Hlm. 105.



Bab *keempat* membahas tentang dinamika dan proses bubarnya Partai Masyumi.

Bab *kelima* penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan dalam bab ini dapat diambil suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan dan ditarik rumusan yang bermakna. Sementara hal-hal lain yang belum dapat dijelaskan dalam penelitian ini dituangkan sebagai saran bagi peneliti selanjutnya.

